RILIS MEDIA
(MINGGU, 5 JUNI 2022)

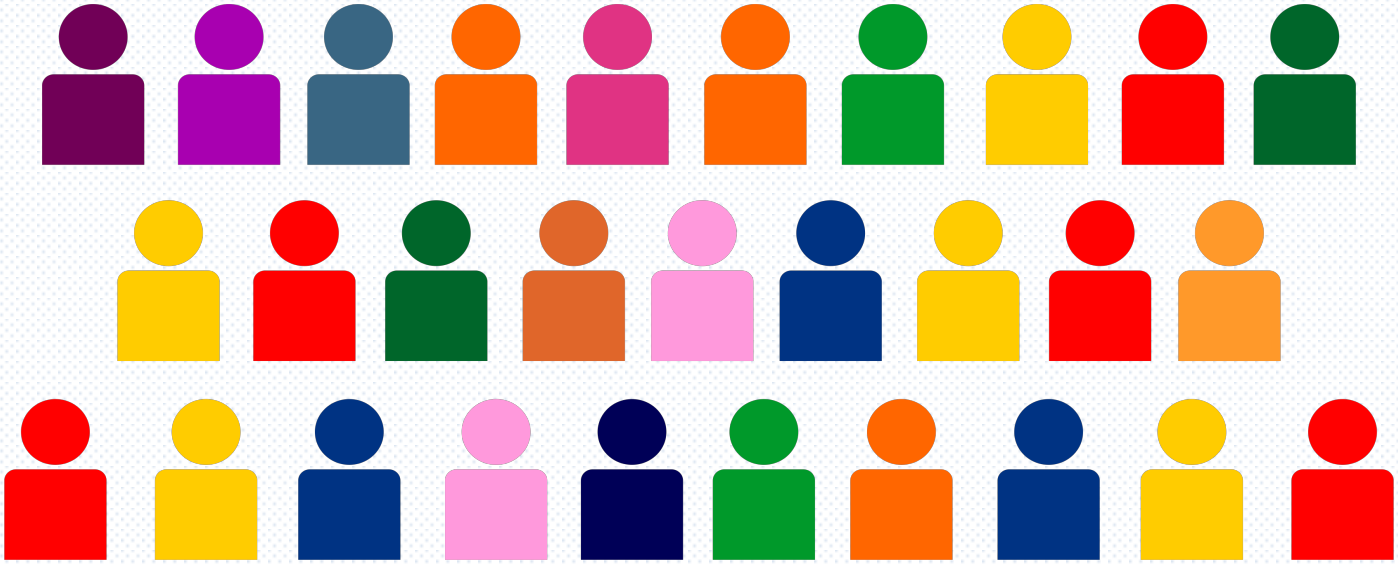

JAJAK PENDAPAT AHLI TENTANG ISU-ISU KRUSIAL KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN

Jl. Mampang Prapatan VIII No. 38
Jakarta Selatan

www.populicenter.org
info@populicenter.org

populi center
PUBLIC OPINION & POLICY RESEARCH

PENGANTAR

- Populi Center melakukan jajak pendapat dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas untuk menilai kondisi kebangsaan dan kenegaraan. Wawancara dilakukan oleh petugas yang telah dilatih dan memahami maksud serta tujuan dari setiap pertanyaan. Dalam jajak pendapat ini, pertanyaan meliputi isu mengenai kinerja demokrasi, isu pemekaran, dan lain-lain. Adapun kalangan yang dimintai pendapatnya berasal dari beragam latar belakang, antara lain dosen/akademisi, peneliti lembaga riset, NGO, jurnalis, pemerintah, hingga anggota DPR RI dan DPD RI.

- Terdapat beberapa temuan menarik dalam jajak pendapat ini. Dari 50 narasumber ahli, sebesar 68 persen menilai baik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu ahli menyebutkan adanya sistem kepartaian yang stabil, ruang untuk menyampaikan pendapat, dan *trust* terhadap pemerintah yang cukup tinggi, menjadi beberapa tolak ukur untuk menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan relatif baik. Meski demikian, masih terdapat 32 persen narasumber ahli yang menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia buruk/sangat buruk.

- Pada pertanyaan terpisah terkait dengan kondisi bernegara, sebesar 58 persen narasumber ahli mengatakan bahwa kebebasan berpendapat mengalami kemunduran, disusul kemunduran dalam hal pemberantasan korupsi (52 persen), kemunduran dalam partisipasi publik terkait pembuatan kebijakan strategis (52 persen), kemunduran praktek *check and balances* eksekutif dan legislatif di tingkat pusat (52 persen), kemunduran dalam hal penegakan hukum (36 persen), kemunduran dalam hal keterbukaan informasi publik (28 persen), dan kemunduran dalam kebebasan berserikat/berkumpul (26 persen).

- Di antara empat aktor politik yang dievaluasi kemampuannya dalam menyerap aspirasi publik, Presiden menempati posisi teratas sebagai aktor politik yang dianggap paling baik dalam menyerap aspirasi publik (78 persen). Sementara aktor politik lainnya, yaitu anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan partai politik dianggap relatif kurang mampu menyerap aspirasi publik. Mayoritas ahli menilai buruk/sangat buruk kemampuan aktor-aktor tersebut dalam menyerap aspirasi publik.

- Saat narasumber ahli diminta pendapatnya terkait apakah setuju atau tidak setuju apabila POLRI berada di bawah koordinasi sebuah kementerian, sebesar 60 persen narasumber ahli menjawab setuju. Adapun sebesar 34 persen narasumber ahli menjawab tidak setuju, dan sebesar 6 persen narasumber ahli menolak untuk merespons pertanyaan ini.

- Di antara sejumlah kebijakan masa pandemi yang ditanyakan pada narasumber ahli, kebijakan vaksinasi nasional merupakan kebijakan yang dianggap paling berhasil dengan skor penilaian 7,6. Kemudian diikuti dengan pelayanan kesehatan (7,0), transformasi ekonomi digital (6,8), penerapan *e-government* (6,8), dan pembelajaran *online* (6,6).

METODOLOGI

Wawancara dilakukan terhadap 50 orang ahli pada bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan. Pelaksanaan jajak pendapat ahli diselenggarakan pada tanggal

19 hingga 26 Mei 2022.

- Jumlah narasumber yang diwawancarai adalah **50 orang ahli** yang dipilih secara *purposive.*
  - Narasumber ahli dipilih berdasarkan kompetensi di bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan.
  - Jajak pendapat ini tidak ditujukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi sosial dan politik di Indonesia.
  - Hasil jajak pendapat ini juga tidak berpretensi untuk mewakili pandangan ilmuwan sosial, politik, dan pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, melainkan hanya merepresentasikan pandangan para ahli yang menjadi narasumber.

RILIS MEDIA
(MINGGU, 5 JUNI 2022)

NARASUMBER

50 AHLI

NAMA	INSTANSI
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si	Universitas Diponogoro
Diasma Sandi Swandaru, M.H	Universitas Gadjah Mada
Prof. Dr. Lili Romli, M.Si	BRIN
Dr. Ujang Komarudin, M.Si	Universitas Al Azhar
Dr. Abdul Gaffar Karim	Universitas Gadjah Mada
Leo Agustino Ph.D	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ella Prihatini, S.I.P., MDP, Ph.D.	Universitas Bina Nusantara
Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D	Universitas Paramadina
Dr. Berly Martawardaya	Universitas Indonesia
Dr. Luky Djani	Universitas Veteran Jakarta
Arya Fernandes	CSIS
Ray Rangkuti	Lingkar Madani
Satria Aji Imawan S.IP, MPA	Universitas Gadjah Mada
Bima Yudishtira M.Sc	Center of Economic and Law Studies
Bayu Dardias, Ph.D	Universitas Gajah Mada
Erman Nurcahyadi Suparman S.Fil, M.Si	KPPOD

NAMA	INSTANSI
Arga Pribadi Imawan, MA	Universitas Gadjah Mada
Mathias Toto Suryaningtyas S.H M.Sc	Harian Kompas
Dr. Ferry Daud Liando	Universitas Sam Ratulangi
Prof. Ramlan Surbakti	Universitas Airlangga
Teuku Kemal Fasya, M.Hum	Universitas Malikussaleh
Rekho Adriadi, M.IP	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Pandhu Yuhsina Adaba	BRIN
Dr. Pieter Abdullah Redjalam	CORE Indonesia
Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D	BRIN
Arfianto Purbolaksono, M.IP	The Indonesian Insitute
Hasan Nasbi Batupahat	Cyrus Network
Erik Kurniawan	Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
Septa Dinata, M.Si	Paramadina Public Policy Institute
Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ph.D	Universitas Muhammadiyah Malang
Dr. Trubus Rahadiansyah	Universitas Trisakti
Muhammad Najib Azca Ph.D	Universitas Gadjah Mada

***Hanya mencantumkan narasumber yang bersedia dipublikasi namanya, dan pendapat yang disampaikan tidak mewakili instansi yang menaunginya.**

DEMOKRASI

KUALITAS DEMOKRASI

Menurut penilaian Anda, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama ini? (%)

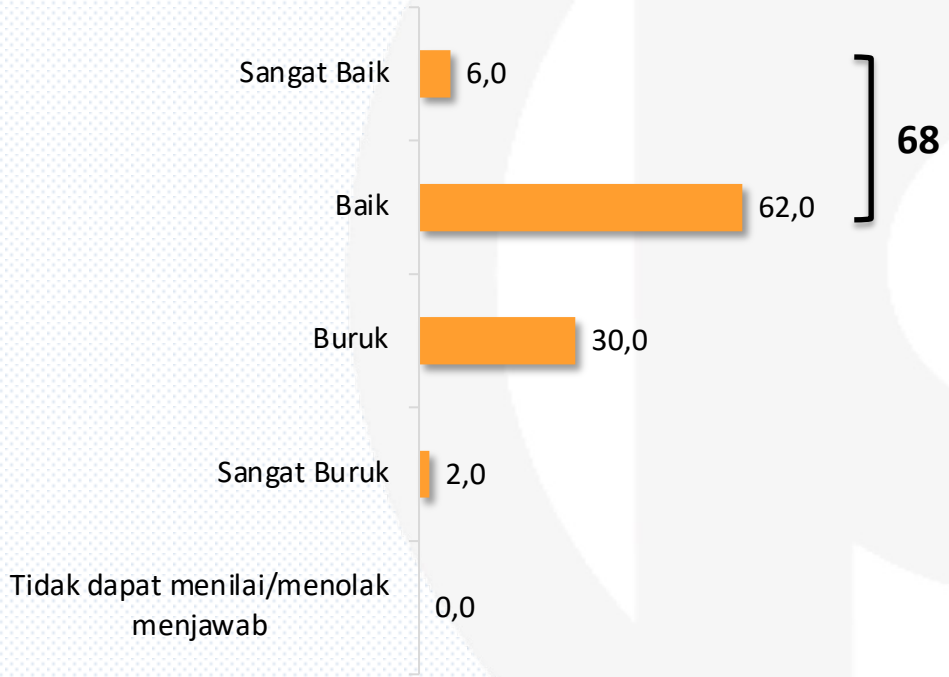

"Pelaksanaan demokrasi saat ini berjalan cukup baik, dengan adanya sistem kepartaian yang stabil, adanya ruang untuk menyampaikan pendapat, dan trust terhadap pemerintah cukup baik. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat catatan untuk memperbaiki demokrasi kita."

Dari 50 narasumber ahli, sebesar 68 persen menilai baik pelaksanaan demokrasi di Indonesia (6 persen sangat baik, 62 persen baik), sedangkan sebesar 32 persen menilai buruk (30 persen buruk, 2 persen sangat buruk).

KONDISI KENEGARAAN

Bagaimanakah penilaian Anda mengenai kondisi-kondisi berikut ini, apakah mengalami perbaikan, tidak ada perubahan sama sekali, atau mengalami kemunduran: (%)

ASPEK	MENGALAMI PERBAIKAN	TIDAK ADA PERUBAHAN	MENGALAMI KEMUNDURAN	TIDAK BISA MENILAI/MENOLAK MENJAWAB	TOTAL
KEBEBASAN BERPENDAPAT	20,0	20,0	**58,0**	2,0	**100,0%**
PEMBERANTASAN KORUPSI	22,0	26,0	**52,0**	0,0	**100,0%**
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN STRATEGIS	20,0	28,0	**52,0**	0,0	**100,0%**
CHECKS AND BALANCES EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI TINGKAT PUSAT	20,0	28,0	**52,0**	0,0	**100,0%**
PENEGAKAN HUKUM	24,0	40,0	**36,0**	0,0	**100,0%**
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	24,0	48,0	**28,0**	0,0	**100,0%**
KEBEBASAN BERSERIKAT/BERKUMPUL	32,0	42,0	**26,0**	0,0	**100,0%**

Pada pertanyaan yang ditanyakan secara terpisah terkait dengan kondisi bernegara, sebesar 58 persen mengatakan bahwa kebebasan berpendapat mengalami kemunduran, disusul pemberantasan korupsi (52 persen), partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan strategis (52 persen), *check and balances* eksekutif dan legislatif di tingkat pusat (52 persen), penegakan hukum (36 persen), keterbukaan informasi publik (28 persen), dan kebebasan berserikat/berkumpul (26 persen).

AKTOR POLITIK DAN ASPIRASI PUBLIK

Secara umum bagaimana Anda menilai kemampuan aktor politik berikut dalam menyerap aspirasi publik saat ini? (%)

	SANGAT BAIK		BAIK	BURUK	SANGAT BURUK	TIDAK DAPAT MENILAI/MENOLAK MENJAWAB	TOTAL
PRESIDEN	8,0	**78**	70,0	20,0	2,0	0,0	**100,0%**
ANGGOTA DPR RI	4,0	**38**	34,0	48,0	6,0	8,0	**100,0%**
ANGGOTA DPD RI	2,0	**26**	24,0	48,0	12,0	14,0	**100,0%**
PARTAI POLITIK	2,0	**22**	20,0	66,0	4,0	8,0	**100,0%**

Presiden menempati posisi tertinggi sebagai aktor politik yang baik dalam menyerap aspirasi publik dengan 78 persen (8 persen sangat baik, 70 persen baik), diikuti oleh anggota DPR RI dengan 38 persen (4 persen sangat baik, 34 persen baik), anggota DPD RI dengan 26 persen (2 persen sangat baik, 24 persen baik), dan partai politik yang menempati posisi akhir dengan 22 persen (2 persen sangat baik, 20 persen baik).

ISU KEBANGSAAN & KENEGARAAN

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

Menurut penilaian Anda, apakah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masih diperlukan dalam bingkai politik pemerintahan di Indonesia? (%)

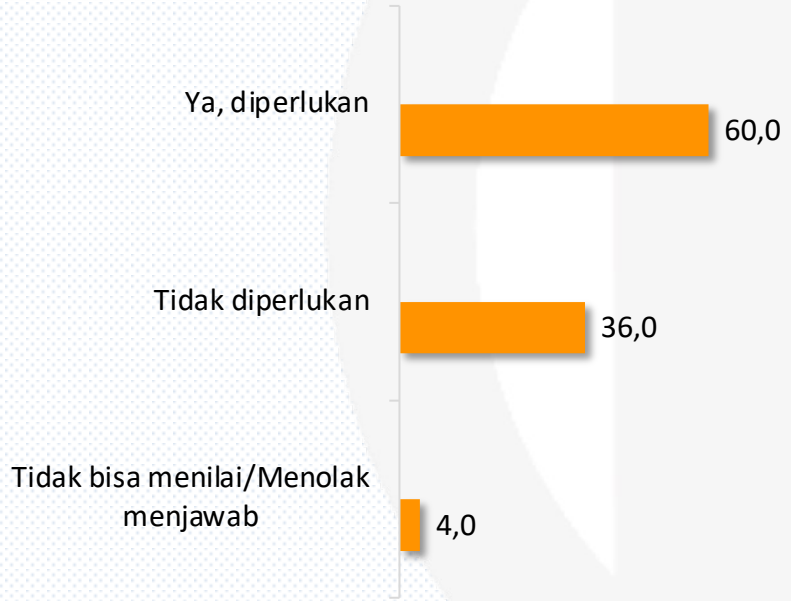

"Untuk menjalankan agenda pembangunan, PPHN diperlukan sehingga fokus orientasinya jelas. Jangan setiap ganti presiden atau ganti pemerintah diubah lagi sehingga kita tidak akan sampai pada tujuan kemerdekaan itu."

Sebesar 60 persen narasumber ahli menjawab Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini masih diperlukan dalam bingkai politik pemerintahan di Indonesia. Adapun sebesar 36 persen narasumber ahli menilai PPHN tidak diperlukan lagi, dan sebesar 4 persen tidak dapat menilai atau menolak untuk merespons pertanyaan ini

DAERAH OTONOMI BARU

Baru-baru ini terdapat wacana untuk membentuk daerah otonomi baru, seperti misalnya di Papua, Maluku, dan lainnya. Menurut Anda, apakah kebijakan tersebut mendesak atau tidak mendesak untuk dilakukan? (%)

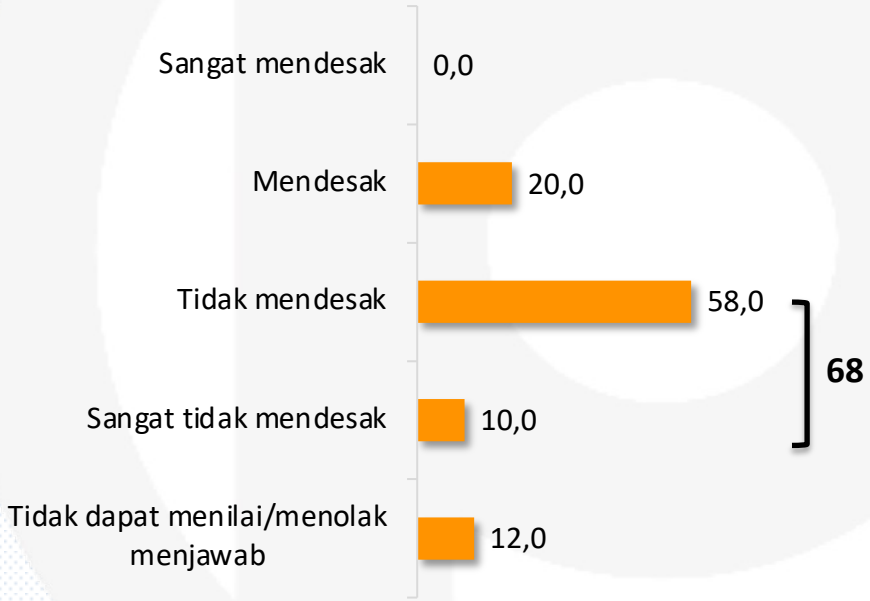

Ketika narasumber ahli ditanyakan mengenai pembentukan daerah otonomi baru, hanya sebesar 20 persen yang menjawab kebijakan tersebut mendesak untuk dilakukan, dan tidak ada satupun ahli yang menjawab sangat mendesak. Sedangkan sebesar 68 persen menjawab tidak mendesak (58 persen tidak mendesak, 10 persen sangat tidak mendesak). Adapun sebesar 12 persen narasumber ahli tidak merespons pertanyaan ini.

PENATAAN LEMBAGA POLRI

Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda apabila Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berada di bawah koordinasi sebuah kementerian? (%)

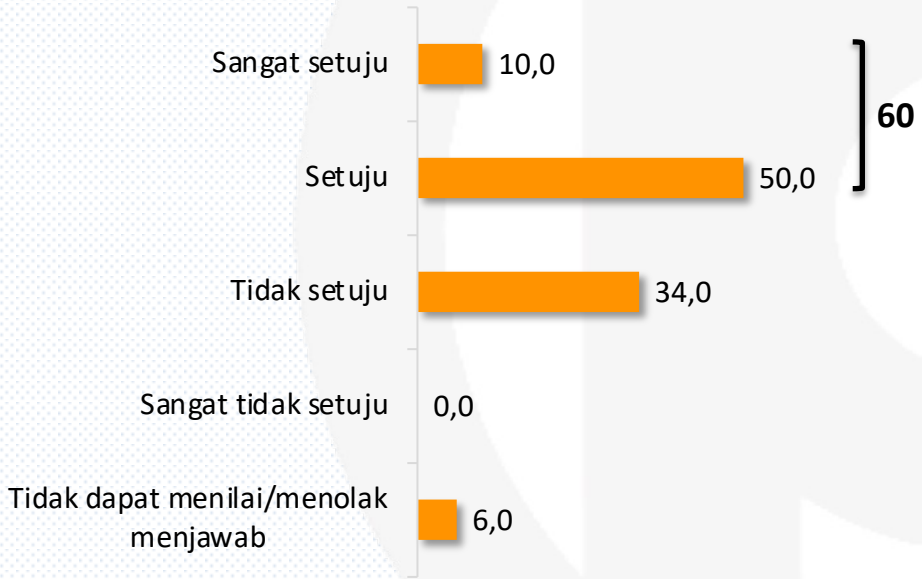

"Dengan berada di bawah koordinasi sebuah kementerian, POLRI dapat dikontrol secara kelembagaan."

Saat narasumber ahli diminta pendapatnya terkait apakah setuju atau tidak setuju apabila POLRI berada di bawah koordinasi sebuah kementerian, sebesar 60 persen menjawab setuju (10 persen sangat setuju, 50 persen setuju). Adapun sebesar 34 persen narasumber ahli menjawab tidak setuju dan tidak ada narasumber ahli yang menjawab sangat tidak setuju. Adapun sebesar 6 persen menolak untuk merespons pertanyaan ini.

KEBERADAAN KPK DAERAH

Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda apabila lembaga negara sejenis KPK juga dibentuk di tingkat daerah? (%)

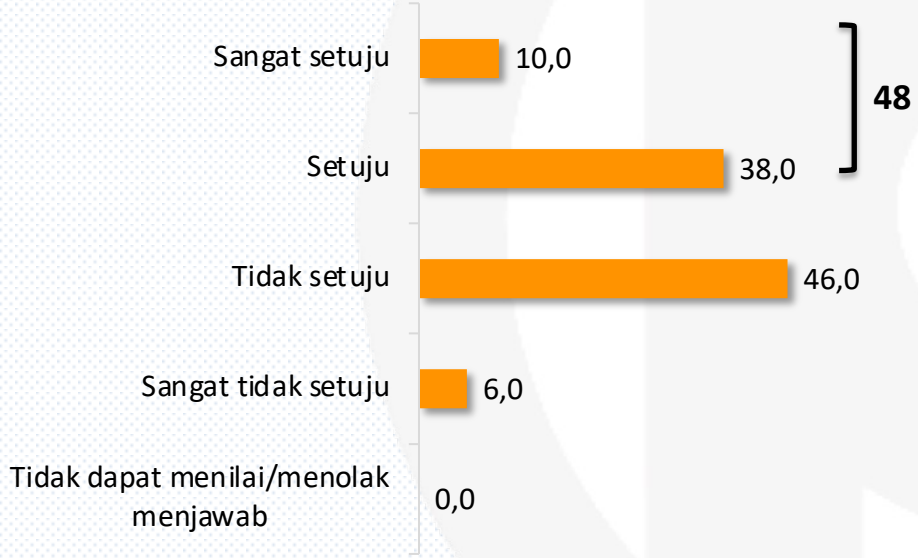

"Setuju, supaya pemberantasan korupsi lebih efektif, tidak hanya level nasional saja dan jangkauannya bisa lebih dalam hingga ke tingkat daerah."

"Tidak setuju. Cukup mengefektifkan dan memperkuat fungsi dari lembaga yang ada, ketimbang membentuk lembaga baru yang syarat konflik kepentingan."

Sebesar 52 persen narasumber ahli menjawab tidak setuju apabila lembaga sejenis KPK dibentuk di tingkat daerah (46 persen tidak setuju, 6 persen sangat tidak setuju). Adapun sebesar 48 persen menjawab setuju bila lembaga seperti KPK dibentuk di daerah (10 persen sangat setuju, 38 persen setuju). Tidak ada narasumber yang tidak merespons pertanyaan ini.

IBU KOTA NEGARA

Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara? (%)

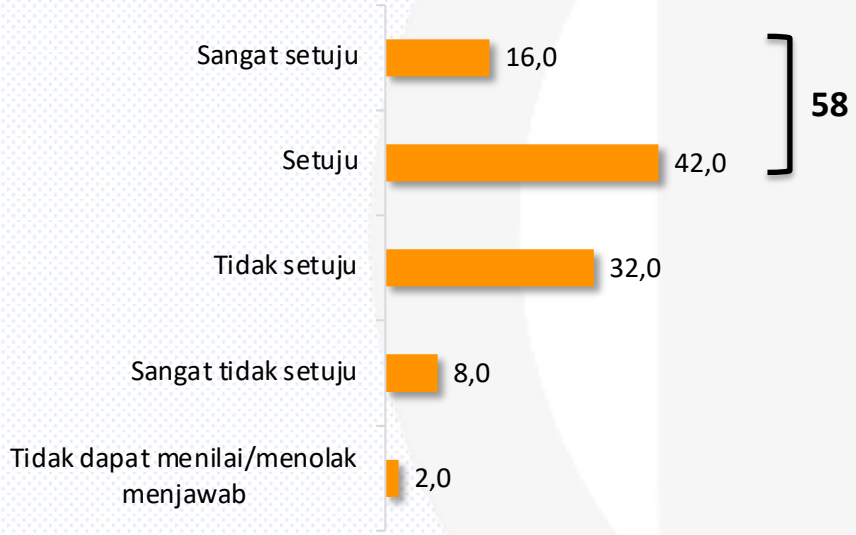

"Setuju, agar tidak ada lagi istilah Jakarta sentris, serta untuk pemerataan pembangunan."

"Tidak setuju. Membangun Ibu Kota Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara saat ini kita sedang dalam pandemi. Waktunya tidak tepat."

Sebesar 58 persen narasumber ahli menjawab setuju dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (16 persen sangat setuju, 42 persen setuju), sedangkan sebesar 40 persen menjawab tidak setuju (32 persen tidak setuju, 8 persen sangat tidak setuju). Terdapat sebesar 2 persen narasumber ahli yang tidak merespons pertanyaan ini.

IBU KOTA NEGARA

Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda jika pemindahan Ibu Kota Negara dijadikan bagian dari kontrak politik dengan pemerintahan baru mendatang? (%)

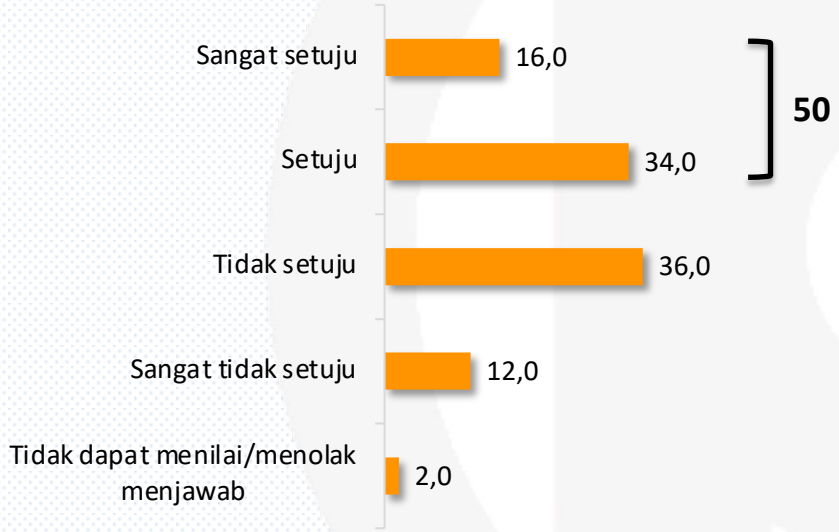

"Perlu, supaya menjamin pemindahan IKN tidak mangkrak, karena Indonesia pernah punya beberapa gagasan IKN baru sebelumnya dan gagal sebab tidak dilanjutkan."

"Tidak perlu, sebab sudah merupakan satu produk keputusan politik, dan itu harusnya mengikat kepada pemerintahan berikutnya."

Pada pertanyaan lain mengenai Ibu Kota Negara, sebesar 50 persen narasumber ahli menjawab setuju apabila pemindahan Ibu Kota Negara dijadikan bagian dari kontrak politik dengan pemerintahan yang akan datang (16 persen sangat setuju, 34 persen setuju), sedangkan sebesar 48 persen menjawab tidak setuju (36 persen tidak setuju, 12 persen sangat tidak setuju). Terdapat sebesar 2 persen narasumber ahli yang tidak merespons pertanyaan ini.

ISU KONTEMPORER

KEBIJAKAN MASA PANDEMI

Dari skala 1-10, 1 sangat buruk dan 10 sangat baik, bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas penerapan kebijakan berikut di masa pandemi? (%)

KEBIJAKAN	PENILAIAN										PERSENTASE SKOR 6-10	RERATA SKOR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
KEBIJAKAN VAKSINASI NASIONAL	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	8,0	26,0	40,0	20,0	0,0	94,0	7,6
PELAYANAN KESEHATAN	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	22,0	24,0	40,0	6,0	0,0	92,0	7,0
TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	28,0	36,0	18,0	8,0	0,0	90,0	6,8
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	0,0	2,0	0,0	0,0	14,0	18,0	34,0	28,0	0,0	4,0	84,0	6,8
PEMBELAJARAN ONLINE	0,0	0,0	0,0	4,0	18,0	16,0	32,0	28,0	2,0	0,0	78,0	6,6

Saat ditanya penilaian narasumber ahli terhadap penerapan sejumlah kebijakan di masa pandemi, vaksinasi nasional merupakan kebijakan yang mendapat penilaian rerata tertinggi yaitu 7,6, diikuti dengan pelayanan kesehatan (7,0), transformasi ekonomi digital (6,8), penerapan *e-government* (6,8), dan pembelajaran *online* (6,6). Sisa angka dari skala 1-10 masuk kategori tidak bisa menilai/tidak menjawab.

EKONOMI DIGITAL

Saat ini penggunaan jaringan internet semakin masif, terutama di sektor perekonomian. Menurut penilaian Anda, apakah pemerintah sudah memberikan dukungan yang cukup optimal dalam menunjang aktivitas ekonomi digital? (%)

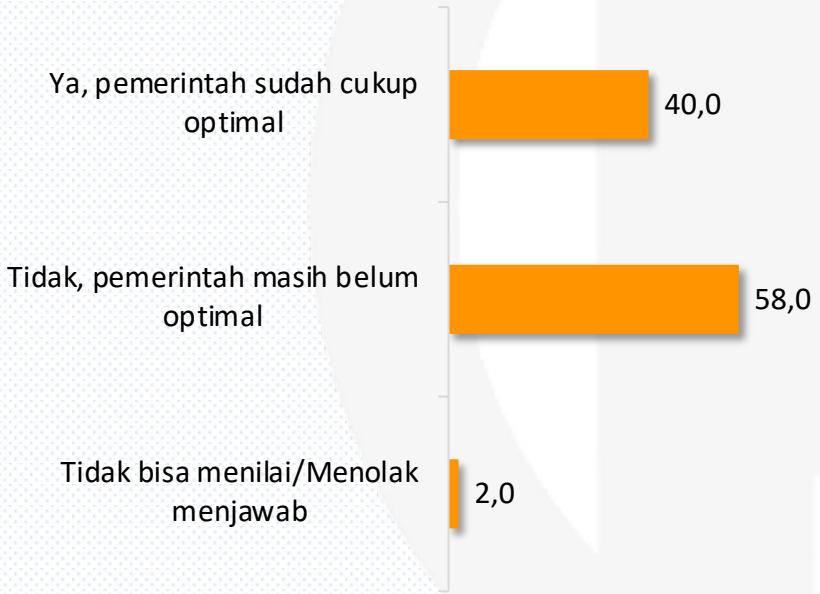

"Saat ini sudah ada fiber optic, sudah lebih baik. Dan sudah memberikan kesempatan untuk Telkom dengan monopoli."

"Pemerataan internet di desa belum memadai, kecepatan internetnya masih termasuk salah satu terendah di ASEAN, dan dari segi biaya masih mahal."

Sebesar 40 persen narasumber ahli menilai bahwa saat ini pemerintah sudah memberikan dukungan yang cukup optimal dalam menunjang aktivitas ekonomi digital. Sementara itu sebesar 58 persen menilai kinerja pemerintah belum optimal dalam memberikan dukungan pada aktivitas ekonomi digital. Adapun sebesar 2 persen narasumber ahli tidak bisa menilai/menolak menjawab pertanyaan ini.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Menurut Anda, apakah Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang mengikuti arus revolusi industri 4.0? (%)

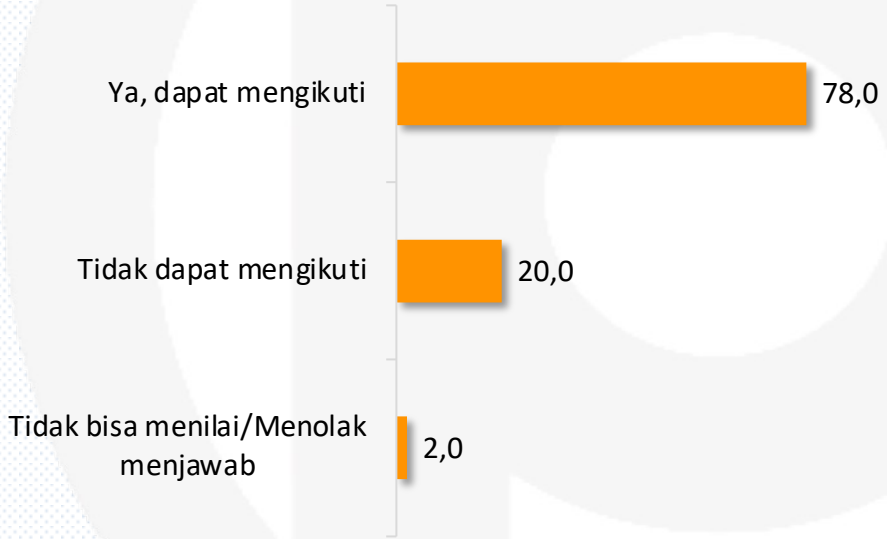

Sebesar 78 persen narasumber ahli menilai bahwa Indonesia dapat mengikuti arus revolusi industri 4.0. Sementara itu sebesar 20 persen narasumber ahli yang menilai bahwa Indonesia tidak dapat mengikuti arus revolusi 4.0. Adapun sebesar 2 persen narasumber ahli yang tidak bisa menilai/tidak menjawab pertanyaan ini.

TERIMA KASIH

www.populicenter.org
info@populicenter.org

Jl. Mampang Prapatan VIII No 38
Jakarta Selatan